

SKRIPSI



PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK BAGI ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR

OLEH:

HAIDIR ALI

B 111 10 275

BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK BAGI ANAK
JALANAN DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

Haidir Ali

NIM B 111 10 275

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada bagian hukum masyarakat dan pembangunan

Program studi ilmu hukum

OLEH:

Haidir Ali

B 111 10 275

Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK BAGI ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

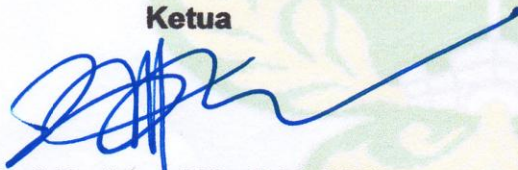
HAIDIR ALI

NIM B 111 10 275

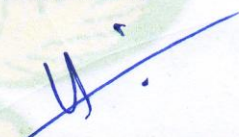
Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada (Selasa / 04 / Februari / 2014)
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

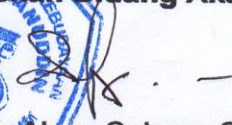
Ketua


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
NIP.19661130 199002 1 001

Sekretaris


Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H
NIP. 19810418 200212 1 004

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HAIDIR ALI
No. Pokok : B111 10 275
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014


Dekan
Fakultas Hukum Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIM. 1996104191989031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

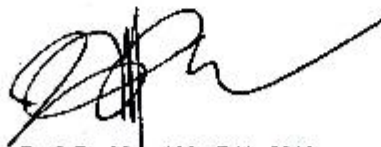
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Haidir Ali
Nomor Pokok : B 111 10 275
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.


Makassar, 25 November 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Pembimbing II



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19810418 200212 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayah Syamsuddin Dg. Gappa dan Ibu Herlina yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada kakak penulis, Suriani dan adik-adik penulis, Syahrul Ramadan dan Keisya Islami Putri

yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa.

Terimakasih penulis haturkan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H selaku Pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Dewan Penguji, Bapak Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H dan ibu Ratnawati, S.H., M.H sebagai penguji pengganti atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Penasihat Akademik atas waktu dan nasihat yang dicurahkan kepada penulis

7. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan
8. Bapak Drs. Mas'ud, S. MM selaku Kepala Dinas Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bapak Abd. Rahim selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Anak Jalanan Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini
9. M. Ghufuran H. Kordi K selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini
10. Bapak Moch. soleh, AKS, MM selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini
11. Bapak Drs. Prasetyo, Bc. Ip. MH selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar bibi, paman, sepupu dan keponakan yang selama ini menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat seangkatan Legitimasi Sudarwin, Irsan Ismail, Hidayat Pratama Putra, Muh.Al Imran, Dio Alifiansyah, Alvin Gunawan, Emi Humairah Hamzah, Bani P. Hasanuddin, Zulfikar, Gunawan, Icmi Tri Handayani, Syarafina Ramlah, Muh. Irfan, Amiruddin, Nur Yanto Altadom, Joe Mirajad, Junaedi Aziz, Sunarto, Qasman, Nurdiansah,

Unci, Ahmad Rozikin dan semua angkatan Legitimasi yang tidak dapat saya sebut satu persatu, atas kebersamaan dan pelajaran hidup yang kalian berikan

14. Kepada kakak Afif Mahfud, S.H. yang telah banyak memberikan masukan berupa saran dan kritik yang membangun

15. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Karate-Do Gojukai Indonesia Unit Fakultas Hukum Unhas atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama ini

16. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum UNHAS atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama ini

17. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Mahasiswa Pecinta Mushallah (MPM) Asy Syariah Fakultas Hukum UNHAS atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama ini

18. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2014

ABSTRAK

Haidir Ali (B 111 10 275), PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK BAGI ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR, dibimbing oleh Musakkir dan Muh. Hasrul.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum, untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak di Kota Makassar.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1)..Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar berperan Sejak tahun 1999, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan. Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah yang menangani program anak jalanan, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan melakukan evaluasi penanganan anak jalanan pada tahun 1999-2000 yang didukung oleh Bank Dunia dan Dinas Sosial Sulawesi Selatan. Beberapa rekomendasi penting saat itu adalah pelibatan Dinas Sosial Kota Makassar, pembebasan pendidikan untuk anak jalanan, dan pelibatan daerah pemasok anak jalanan; 2)..Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum di Kota Makassar yaitu Faktor ekonomi, Kurangnya perhatian orang tua, Perilaku meniru anak, dan Persaingan antar kelompok anak jalanan. Dimana faktor ekonomi yang menjadi faktor dominan anak turun ke jalan dan melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana (berkonflik hukum); 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dipengaruhi faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Peran Lembaga ini yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum bagi anak jalanan yang berkonflik hukum, diantaranya: Kurangnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, kurangnya Peralatan yang memadai, dan Faktor keuangan yang terbatas.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	iv
Persetujuan Pembimbing.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	x
Daftar Isi	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	13
B. Jenis-Jenis Ketaatan Hukum.....	22
C. Anak Jalanan	24
1. Pengertian Anak	24
2. Pengertian Anak Jalanan.....	27
3. Pengelompokan Anak Jalanan	28
D. Anak Yang Berkonflik Hukum.....	31
E. Perlindungan Hukum.....	34
1. Definisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak	34

2. Tanggungjawab Perlindungan Anak	36
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	38
4. Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional	44
5. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	47
6. Lembaga Perlindungan Anak.....	52

BAB III : METODE PENULISAN

A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data.....	55
C. Populasi dan Sampel	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	57

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar.....	58
B. Terjadinya Konflik Antara Anak Jalanan dengan Hukum.....	68
C. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Anak.....	102

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui negara serta harus dijunjung tinggi.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *sucesor* suatu bangsa. Dalam konteks ini, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi hak-hak anak yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya¹.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak². Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang³. Akibat dari perang

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 34

² Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: sinar Grafika , Hlm. 1.

³ *Ibid*, Hlm 24

tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius.

Salah satu topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, terutama anak jalanan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan serangkaian kegiatan guna memperoleh uang demi mempertahankan kehidupannya sehari-hari⁴. Anak jalanan juga mempunyai hak-hak seperti anak yang lain yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapat pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari

⁴ <http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html>. Diakses pada tanggal 9 September 2013 Pukul 11.07 WITA

penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara.

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak khususnya anak jalanan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, Artinya pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai

perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut⁵.

Selanjutnya perlindungan hak anak di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan konvensi hak anak tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990⁶.

Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak . Bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikatkan diri dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak

Selain itu, Pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-Undang

⁵ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1.

⁶ Nasir Djamil, *Op.cit.* Hlm. 28.

Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena Undang-Undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak.

Dalam Pasal 59 disebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin yang disebutkan dalam Pasal 59 bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak dilakukan baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik hukum yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui⁷ : a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c) penyediaan sarana dan prasarana khusus; d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya lembaga perlindungan anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak,

⁷ Pasal 64 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa..

Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kehadiran lembaga ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak saat ini belum mampu mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan anak jalanan. Masih banyak anak jalanan yang terlupakan untuk menjadi objek perlindungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kementerian sosial memperkirakan setidaknya terdapat sekitar 50.000 anak yang tinggal dan mencari nafkah di jalan di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 1999. Namun mereka sendiri memperkirakan bahwa anak jalanan berjumlah jauh di atas 50.000 anak. Banyak pihak yang juga menyakini bahwa jumlah anak jalanan yang sesungguhnya di atas data yang disebutkan kementerian sosial. Berbagai perkiraan mengenai jumlah anak jalanan yang ada berkisar antara 50.000-170.000

anak⁸. Tahun 2010, jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai 200.000 anak dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 230.000 anak. Ini berarti jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun⁹.

Laporan Steven Allen¹⁰ menyatakan bahwa lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan¹¹. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak tersebut tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi.

Pada rentang waktu Januari hingga Mei 2012, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk

⁸ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 9.

⁹ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=307326>. Html, diakses pada tanggal 5 september 2013 pukul 13.47 WITA

¹⁰ Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia,. Hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*

orang dewasa dan pemuda. Sementara itu hingga bulan Agustus tahun 2013 tercatat 7.526 anak di seluruh Indonesia berkasus hukum dan 5.709 di antaranya menjalani proses pidana¹².

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan untuk lebih mahir melakukan tindak pidana dan bahkan menjadi korban kekerasan¹³, Hal yang sama juga terjadi di Kota Makassar

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Dalam perkembangannya Kota Makassar masih meninggalkan beberapa masalah kesejahteraan sosial, salah satunya permasalahan anak jalanan. Kehadiran anak jalanan di kota Makassar merupakan sesuatu yang sangat dilematis, semenjak pemerintah kota Makassar mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di kota Makassar yang melarang anak jalanan untuk melakukan aktivitas di jalan.

Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan (*income*) yang dapat membuatnya bertahan hidup dan

¹² Kompas, 6 September 2013, *Hingga Agustus 7.526 Anak Berkasus Hukum*. Hlm. 28

¹³ Steven Allen, *opcit*, Hlm. ii-iii

menopang kehidupan keluarganya. Namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk terlibat dalam masalah hukum, dalam hal ini dibutuhkan peran lembaga perlindungan anak untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi hak-hak anak. Hal ini karena dilihat dari sudut pandang anak, banyak faktor serta aktor yang berperan membuat anak jalanan terlibat dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah data penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum ?
3. Bagaimanakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak.

D. Manfaat Penulisan

1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai bagaimana peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar.
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum..
3. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁴.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 5

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 8

Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena¹⁶:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 17

penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;

- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut¹⁷:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya;

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 152

- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya¹⁸.

¹⁸ Soerjono Seokanto. *Op.cit.* Hlm. 27.

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainly*) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi pula sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara-negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang-undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari unsur kalangan penegak hukum yakni polisi yang mempunyai peranan penting dalam membawa kedamaian bagi masyarakat luas.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut ditujukan kepada polisi yang mempunyai pangkat

terendah sampai dengan polisi, tidak sempat memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkatnya yang rendah.

Di dalam kehidupan sehari-hari maka begitu menyelesaikan pendidikan kepolisian maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat dimana dia akan menghadapi berbagai masalah yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Pada umumnya, polisi dalam menjalankan tugasnya selalu dihadapkan berbagai macam manusia dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing. Biasanya, ada masyarakat yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada pula yang pura-pura menaati ketika ada polisi, dan bahkan ada yang secara terang-terangan melawannya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum dapat menghasilkan kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya jika ketaatan terhadap hukum dilakukan hanya karena adanya sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar.

Adapun cara yang biasa diterapkan oleh polisi untuk membuat warga masyarakat taat terhadap hukum biasanya dilakukan dengan cara

yang lunak (*persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dilakukan suatu penyuluhan berulang-ulang agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami tentang hukum pada saat penyuluhan dan diharapkan ke depan masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran.

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses

hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun¹⁹.

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan professional (budaya hukum internal).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

B. Jenis-jenis Ketaatan Hukum

Menurut H.C. Kelman Ketaatan hukum dapat dibedakan ke dalam 3 jenis yaitu²⁰:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia memerlukan pengawasan secara terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 12-15

²⁰ Achmad Ali. 2009. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 348

3. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena benar-benar ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah. Sebaliknya semakin banyak yang ketaatannya bersifat

internalization maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu²¹.

C. Anak jalanan

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat

²¹ *Ibid.* Hlm. 349.

dipandang dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak²²

Definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Namun dalam perkembangannya Mahkamah

²² Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo. Hlm.1.

Konstitusi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*), maka definisi anak: “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²³

2. Pengertian Anak Jalanan

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak jalanan hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok, ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemukimannya di daerah-daerah kumu atau bahkan sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap, perangainya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan kekhasan lain anak jalanan, menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah.

²³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 41.

Menurut Kementerian Sosial²⁴, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar mendefinisikan Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari;

Anak jalanan atau sering disingkat anjal menjadi sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Sampai saat ini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak.²⁵

3. Pengelompokan Anak Jalanan

Menurut penelitian Kementerian Sosial dan UNDP (United Nations Development Programme) di Jakarta dan Surabaya²⁶, anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

²⁴ Departemen Sosial RI. 2001. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial. Hlm. 20

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan__ diakses pada tanggal 04 september 2013, Pukul 15.00 WITA

²⁶ Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) 2000, *Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singah Jakarta : Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial*. Hlm. 2-4

1. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya ;
 - b. Berada di jalanan selama 8-10 jam untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/ tidur;
 - c. Tidak lagi sekolah;
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.

2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. Berada di jalanan selama 8-16 jam;
 - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/ saudara, umumnya di daerah kumuh;
 - d. Tidak lagi sekolah;
 - e. Pekerjaan : penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll.
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
 - a. Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. Bekerja di jalanan selama 4-5 jam;
 - c. Masih bersekolah;
 - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen, dll.
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:
- a. Tidak lagi berhubungan/ berhubungan teratur dengan orang tuanya;
 - b. Berada di jalanan selama 8-24 jam;
 - c. Tidur di jalan atau di rumah orang tua;
 - d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti dalam suryanto (2002) membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut²⁷:

Pertama, *children on the street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.

Kedua, *children of the street* yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.

Ketiga, *children from families of the street* yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini

²⁷ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi. 2002. *Krisis dan Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University Press: Hlm. 41

mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya.

D. Anak Yang Berkonflik hukum

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya²⁸.

Anak Berkonflik hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu anak yang melakukan tindak pidana . Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut dengan kenakalan anak (anak nakal). Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal berdasarkan Pasal 1 butir (2) mempunyai dua pengertian, yaitu:

a. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya

²⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses pada tanggal 5 september 2013 pukul 11.26 WITA

ketentuan pidana Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Perbuatan terlarang bagi anak adalah menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Kenakalan anak diambil dari istilah "*juvenile delinquency*". *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda. Sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, melanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat²⁹.

Suatu perbuatan dikatakan delikueni apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 291.

ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif³⁰.

Pengertian *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang³¹.

Sedangkan *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan³².

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*delinquency*). Hal ini

³⁰ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.10.

³¹ Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2), kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 7.

³² Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, Hlm. 40.

yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi *delinquen* disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik *delinquen* tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar benar menjadi nakal dan kriminal.

Shanty Dellyana dalam bukunya Wanita dan Anak di Mata Hukum mengutip pendapat dari Robert K. Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).

E. Perlindungan hukum

1. Defenisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada anak (anak jalanan) untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari negara. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus

dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar terciptanya tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi dari anak.

Sesuai dengan yang dirumuskan Kementerian Sosial Indonesia dalam petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan, maka fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk menghindari anak dari keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua. Fungsi ini juga diserahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan keluarga dari kemungkinan perpisahan.

Hal diatas harus dibedakan dengan istilah perlindungan anak karena hal ini tidak menunjukkan dengan apa perlindungan itu akan ditegakkan. Sebagaimana pengertian perlindungan anak itu sendiri yang tersebut di bawah ini³³:

- 1) Perlindungan anak adalah segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan

³³ Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 19

pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dari kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial³⁴.

2. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi

³⁴ *Ibid.* Hlm. 35

kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang

- secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, adapun prinsipnya yaitu³⁵:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia,

³⁵ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

bangsa, dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, memerlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/ keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi di dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orangtua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orangtua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah

perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan³⁶.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
- (b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/ pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
- (d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.
- (e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.

³⁶ Irwanto. "*Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*". Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997. Hlm. 2-4

- (f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.
- (g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/ tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Kemudian Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
 - 1) sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan mertabatnya.
 - 2) memperkuat penghargaan atau penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
 - 3) mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan yang tidak dilarang

oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.

(c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana sekurang-kurangnya memperoleh jaminan hak:

- 1) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.
- 2) Diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali, atau kuasa hukumnya.
- 3) Untuk perkaranya diputus/ diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan atau kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak.
- 4) Tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah.
- 5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan atau kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku.
- 6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan maka anak berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma.
- 7) kerahasiaan pribadi dihormati dan dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan,

(d) Negara harus berupaya membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukan

kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:

- 1) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana.
 - 2) Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati
- (e) Berbagai macam putusan terhadap anak seperti pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

4. Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi

masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas³⁷.

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/ instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini (diantaranya adalah masalah anak jalanan), antara lain adalah sebagai berikut³⁸:

- 1) Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1389 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai "*Declaration on the Right of Child*"
- 2) Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai "*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" (*The Beijing Rules*).
- 3) Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai "*the prevention of juvenile delinquency*"
- 4) Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai "*Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and International.*"
- 5) Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai "*the use of children in the illicit trefic in narcotic drugs*"

³⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 153

³⁸ *Ibid.* Hlm. 457

- 6) Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *"Convention on The Rights of The Child"*
- 7) Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 mei 1990 mengenai *"The Prevention Of Drugs Consumption among young Persons"*
- 8) Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *"United Nations Duidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency"* (The Riyadh Guidelines)
- 9) Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *"United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of The Their Liberty"*
- 10) Resolusi Mu-PBB 45/115 tanggall 14 Desember 1990 mengenai *"The Instrumen Use of Children in Criminaln Activities"*
- 11) Resolusi Komisi HAM PBB 1993/80 tanggal 10 maret 1993 mengenai *"the Aplication of International standards concerning the Human Rights of detained Juveniles"*
- 12) Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 maret 1994 mengenai *" the need to adopt affective international measures for the prevention and cradication of the sale of children, child prostitution and child phornography"*
- 13) Resolusi Komisi HAM 1994/ 93 tanggal 9 maret 1994 mengenai *"The plight of Street Children"*
- 14) Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 maret 1994 mengenai *"The effects of armed conflicts on children's lives"*

15) Kongres PBB IX tahun 1995 mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*”, diajukan dua draft resolution mengenai:

- a) *Application of United Nations Standards Norms in Juvenile Justice* (Dokumen A/CONF. 169/L.S)
- b) *Elimination of Violence Against Children* (Dokumen A/CONF.169/L.11)

Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup spektrum yang sangat luas untuk menjamin hak-hak anak, tidak hanya perlindungan hukum dalam suatu proses peradilan bagi anak yang berkonflik hukum.

5. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk konkritisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak-Hak Anak. Sementara itu, hak-hak anak secara umum terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat. Dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam pariwisata yang mengandung unsur kekerasan, Dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga dapat dilihat pada pasal 64, yakni:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua, atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

F. Lembaga perlindungan anak

Sejarah perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah ada sejak lama. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini dapat kita lihat dengan tegas di dalam penjelasan UUD tahun 1945. Dalam negara hukum mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

Pada hakikatnya “Hak Asasi Manusia” terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat dan martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan keselarasan hubungan:

1. Antara manusia dengan penciptanya.
2. Antara manusia dengan manusia.
3. Antara manusia dengan masyarakat dan negara.
4. Antara manusia dengan lingkungannya.
5. Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.

Maka dapat dilihat kriteria hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hak dan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewajiban asasi ini melekat pada manusia sebagai karunia Tuhan yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak-hak asasi anak.

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi kondisi lingkungan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial yang pada gilirannya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.

Begitu juga dengan anak yang berkonflik hukum yang merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat. Anak yang berkonflik hukum merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Maraknya anak yang berkonflik hukum disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan bersama anggota masyarakat. Anak tersebut perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya sebagai penerus bangsa. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Anak yang berkonflik hukum diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Salah satu lembaga yang mempunyai dedikasi dan perhatian tentang perlindungan anak adalah lembaga perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak ini dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat yang merupakan kewajiban masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Penulis akan mengadakan penelitian di beberapa instansi yaitu, Dinas Sosial Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak di Kota Makassar, Panti Sosial Marsudi Putra Kementerian Sosial Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Anak Jalanan di Kota Makassar. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari instansi tersebut penulis dapat mencari data dan informasi yang relevan dengan judul penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada Dinas Sosial Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak di Kota Makassar, Panti Sosial Marsudi Putra Kementerian Sosial Republik

Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Anak Jalanan di Kota Makassar

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature dan dokumen-dokumen, buku, serta peraturan perundang-perundangan dan bahan tulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup. Tujuan diadakannya populasi adalah agar dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya generalisasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak jalanan yang berkonflik hukum di Kota Makassar baik yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan maupun yang belum. Dari 80 jumlah populasi anak jalanan maka ditetapkan sampelnya sebagai berikut yaitu anak jalanan yang berkonflik hukum sebanyak 20 % dari total populasi. Keseluruhan sampel

tersebut di atas penarikannya menggunakan teknik non acak (non random sampling) atau sampel non probabilitas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Literature Research*)

Metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai buku kepustakaan, artikel dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau dialog langsung, serta meminta data-data tertulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini.

E. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar

Anak adalah tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa yang akan datang, karena itu kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap anak di masa kini. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Hal ini juga berlaku bagi anak jalanan yang mempunyai hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya.

Peningkatan jumlah anak jalanan merupakan masalah yang harus segera diatasi, terkait jumlah anak jalanan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Khususnya di Kota Makassar yang merupakan kota terbesar di Indonesia bagian timur.

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bergerak untuk menangani permasalahan anak jalanan mencatat bahwa jumlah anak jalanan di Kota Makassar sempat mengalami penurunan jumlah pada tahun 2008. Menurut kepala bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Anak Jalanan Kota Makassar, Abd. Rahim³⁹ menyatakan bahwa salah satu penyebab penurunan jumlah tersebut disebabkan oleh karena berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yang melarang memberikan uang kepada anak jalanan di Kota Makassar beberapa tahun terakhir.

Peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, Abd. Rahim menyatakan bahwa

“ faktor utama yang menyebabkan anak melakukan aktivitas seperti mengamen, meminta-minta di jalan adalah faktor ekonomi, dimana keluarganya tidak mampu dalam membiayai anaknya. Oleh karena itu orang tuanya menyuruh anaknya ke jalan untuk memperoleh penghasilan guna membantu kebutuhan ekonomi keluarga karena berdasarkan penelitian yang saya lakukan setiap orang tua anak jalanan mempunyai 5-7 orang anak”.

Jumlah anak jalanan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³⁹ Wawancara tanggal 31 Oktober 2013

Table I
Jumlah Anak Jalanan di Kota Makassar
(2007-2013)

No	Tahun	Jumlah
1	2007	1407
2	2008	869
3	2009	870
4	2010	901
5	2011	918
6	2012	990
7	2013	1.352

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar

Meski sempat mengalami penurunan jumlah pada tahun 2008, namun jumlah anak jalanan setiap tahun kembali mengalami peningkatan. Jumlah anak jalanan pada tahun 2007 berjumlah 1407 orang, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 869 orang, kemudian data tahun 2009 menunjukkan terjadi peningkatan menjadi 870 orang anak jalanan. Pertumbuhan anak jalanan pada tahun 2010 semakin besar dengan jumlah anak jalanan 901 orang dan pada tahun 2011 menjadi 918 orang anak jalanan sedangkan pada tahun 2012 anak jalanan berjumlah

990 orang. Data sementara jumlah anak jalanan pada akhir tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan jumlah yang cukup besar dari tahun 2012 sebanyak 990 orang hingga bulan ke-9 tahun 2013 menjadi 1.352 orang.

Peningkatan jumlah populasi anak jalanan secara sederhana dapat digambarkan seperti grafik di bawah ini:



Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar

Untuk menekan jumlah anak jalanan diperlukan upaya-upaya berupa pengadaan program-program yang dapat menyentuh seluruh anak jalanan. Program tersebut bertujuan agar anak jalanan tidak lagi menggantungkan hidupnya di jalan. Abd. Rahim menambahkan bahwa

Untuk menekan peningkatan jumlah anak jalanan pada tahun 2014 nanti maka Dinas Sosial akan melakukan beberapa program secara rutin, seperti membuat 10 posko anak jalanan. Posko tersebut masing-masing diletakkan di sekitar lampu merah di kota Makassar yang berfungsi memberikan pelatihan dan pengajaran serta menangkap anak jalanan untuk dimasukkan ke panti sosial di maros agar dilakukan pembinaan. Ini bertujuan agar tidak ada lagi anak jalanan melakukan aktivitas di sekitar lampu merah yang dapat mengganggu pengguna jalan. Selain itu Dinas Sosial rutin melakukan patroli keliling sebanyak 2-4 kali seminggu di kota Makassar, bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian dan staf dinas sosial guna menangkap anak jalanan agar tidak lagi melakukan aktivitas di jalan.

Data anak jalanan di atas sangat memprihatinkan. Anak jalanan yang semestinya sekolah dan berada di rumah dengan menikmati hak-haknya sebagai anak pada umumnya, karena keadaannya membuatnya harus turun ke jalan. Tidak hanya itu tak jarang anak jalanan melakukan tindak pidana (berkonflik hukum) yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan khusus bagi anak jalanan adalah lembaga perlindungan anak. Salah satu sampel lembaga perlindungan anak di Makassar tempat penulis melakukan penelitian adalah Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sul-Sel).

Berdasarkan penelitian penulis di lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan M. Ghufuran H. Kordi K⁴⁰ diperoleh data tentang peran lembaga perlindungan anak selama ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Ghufuran H. Kordi K menyatakan bahwa

Sejak tahun 1999, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Kota Makassar, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan. Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah yang menangani program anak jalanan, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan melakukan evaluasi penanganan anak jalanan pada tahun 1999-2000 yang didukung oleh Bank Dunia dan Dinas Sosial Sulawesi Selatan. Beberapa rekomendasi penting saat itu adalah pelibatan Dinas sosial Kota Makassar, pembebasan pendidikan untuk anak jalanan, dan pelibatan daerah pemasok anak jalanan.

Pada Tahun 2001, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan bereaksi untuk menentang ide mempulaukan anak jalanan yang waktu itu berkembang di media massa. Selain melanggar hak anak dan hak asasi manusia, ide mempulaukan anak jalanan juga diyakini tidak menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi, karena akan ada anak jalanan baru yang muncul menggantikan anak-anak yang dipaksa ke luar dari jalanan.

Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan terus mengikuti setiap proses penanganan anak jalanan di Kota Makassar dan terus memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah

⁴⁰ Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan, dan Kementerian Sosial dalam rangka memberikan penanganan yang terbaik bagi anak.

Tahun 2005, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan mendukung pelarangan anak di jalanan di Kota Makassar. Penanganan anak jalanan ini tentunya diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain, yaitu mengembalikan anak-anak ke sekolah, penguatan ekonomi keluarga, termasuk secara selektif perlu melakukan tindakan represif terhadap orang tuanya. Hal ini karena pada beberapa kasus, orang tuanyalah yang berperan penting dalam mendorong anak-anak untuk turun kejalan.

Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan mendukung proses hukum bagi orang tua yang mengeksploitasi anaknya. Tentu hukum harus dijadikan sebagai proses mendidik dan penjeratan bagi orang tua yang dianggap keterlaluan.

Tahun 2008, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan menentang isi dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembinaan dan Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan berpendapat bahwa penanganan anak jalanan tidak boleh menempatkan anak sebagai masalah, pelaku kriminal, pembawa onar, pengganggu ketertiban, dan seterusnya, melainkan menempatkan anak jalanan sebagai korban dari sistem sosial

dan pembangunan karena menempatkan anak sebagai pihak yang disalahkan adalah pelanggaran hak anak dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan kemudian membentuk konsorsium Organisasi Non Pemerintah untuk bekerjasama dengan Dinas Sosial memperbaiki Draf Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Sekalipun masih terdapat sejumlah kekurangan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut isinya sudah lebih baik dan telah disahkan sebagai Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

M. Ghufran H. Kordi K menambahkan bahwa

Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan merupakan lembaga advokasi dan layanan. Sebagai lembaga advokasi, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan melakukan penelitian atau kajian untuk mendorong berbagai perubahan kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan hak dan perlindungan anak. Sejak tahun 1998, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan menjadi bagian dari tim nasional yang aktif mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kemudian Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2002.

Di tingkat Sulawesi Selatan, sejak awal Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan mensosialisasikan Konvensi Hak Anak (KHA), mengampanyekan isu hak dan perlindungan anak ke publik, memperkuat upaya perlindungan anak khususnya anak jalanan yang berkonflik hukum melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Memberikan advokasi (bantuan hukum) bagi anak jalanan pada setiap proses hukum yang dihadapinya, mendorong perubahan kebijakan serta memperkuat sumber daya pemerintah dengan cara melatih aparat penegak hukum seperti kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana agar tidak melakukan kekerasan dalam penangkapan anak. Karena selama ini anak jalanan (laki-laki dan perempuan) menghadapi resiko mengalami kekerasan dari berbagai pihak. Kekerasan terhadap anak-anak tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum Dalam setiap razia, penggusuran dan upaya pembersihan anak-anak jalanan dan anak yang dilacurkan mengalami intimidasi dan ancaman, caci maki, hinaan, dan pemukulan dari aparat Negara.

Di Kota Makassar, anak jalanan mengalami kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, ditampar, dijitak, dan ditabrak, yang dilakukan oleh sopir, preman, satpol PP, dan pedagang asongan dewasa. Namun pelaku kekerasan utama adalah Polisi dan Satpol PP. Anak jalanan juga dipalak oleh preman⁴¹.

Hal ini dibenarkan oleh beberapa anak jalanan yang menjalani hukuman di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makasar yang dalam proses penangkapan mengalami tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan penangkapan terhadap anak jalanan. Berdasarkan wawancara yang

⁴¹ Penelitian Institut Saribattang dan LPA Sulsel tahun 2007.

dilakukan dengan Reski (15 Tahun)⁴² yang dihukum berdasarkan kasus pencurian menyatakan bahwa:

Pada saat saya ditangkap ada 3 polisi datang, na pukulka dan natamparka itu polisi dan napaksaka mengakui kesalahanku. Nda na kasi liatka surat penangkapanku jadi bingungka juga langsungja na tangkap itu polisi kemudian na bawaka ke kantornya.

Hal senada juga diutarakan oleh Jefrianto (15 Tahun)⁴³ yang menjalani hukuman 1 tahun berdasarkan kasus pencurian menyatakan bahwa:

Pada saat itu saya mencuri hp dengan kumasuki rumahnya orang dan waktuku masuki rumahnya na liatka orangya mau mencuri. Kemudian nabawaka yang punya rumah ke kantor polisi. Di kantor polisi saya dipukul dan ditampar oleh itu polisi dan napaksaka mengaku telah mencuri oleh polisi.

- b. Melakukan pengawasan pada setiap proses hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan agar dipastikan anak dapat menikmati hak-haknya. Tidak hanya itu, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan juga memberikan advokasi (bantuan hukum) bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana (berkonflik hukum).

⁴² Wawancara tanggal 21 November 2013

⁴³ Wawancara tanggal 21 November 2013

B. Terjadinya Konflik Antara Anak Jalanan Dengan Hukum

Keberadaan anak jalanan di Kota Makassar menimbulkan beberapa macam persoalan. Anak jalanan kerap dipandang mengganggu ketertiban kota, namun ada permasalahan yang lebih penting yang harus diperhatikan yaitu pengaruhnya terhadap anak jalanan itu sendiri terkait tumbuh kembangnya sebagai anak. Kehidupan yang mereka jalani membuat mereka tidak memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Mereka berada pada keadaan yang sangat rentan dengan kekerasan dan eksploitasi dan bahkan mereka juga dapat terpengaruh untuk melakukan berbagai macam tindak pidana.

Berikut adalah data jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Makassar. Data tersebut diperoleh dari hasil pengelompokan berdasarkan profesi narapidana yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar kepada narapidana anak yang sedang menjalani pemidanaan dan data yang diperoleh dari Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli⁴⁴

⁴⁴ Panti Sosial Marsudi Putra merupakan lembaga pelaksanaan kesejahteraan sosial yang berada di bawah naungan kementerian sosial republik Indonesia. Panti sosial ini mempunyai tugas pokok untuk melayani dan merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk anak jalanan melalui bimbingan Fisik, Mental, Sosial, Pendidikan dan Keterampilan

Tabel II

Perbandingan Jumlah Anak Jalanan dengan Keseluruhan Anak Didik

Pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah		Persentase Anak Jalanan (%)
		Anak Secara Umum	Anak Jalanan	
1	Kesusilaan	1	-	0.00
2	Kejahatan terhadap ketertiban umum	13	3	18,75
3	Pembunuhan	6	-	0.00
4	Penganiayaan	16	5	31,25
5	Pencurian	24	8	50,00
6	Narkotika	9	-	0,00
Jumlah		69	16	100

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makasar

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berjumlah 69 orang. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut yaitu: Kesusilaan (1 orang), Kejahatan terhadap ketertiban umum (13 orang), Pembunuhan (6

orang), Penganiayaan (16 orang), Pencurian (24 orang), dan Penyalahgunaan Narkotika (9 orang).

Dari keseluruhan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar terdapat 16 orang anak yang dalam kesehariannya sebelum menjalani pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar sebagai Anak Jalanan. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut antara lain: kejahatan terhadap ketertiban umum (3 orang), penganiayaan (5 orang), dan pencurian (8 orang)

Penulis juga melakukan penelitian di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar yang merupakan panti bagi anak jalanan yang berkonflik hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh data jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan anak jalanan.

Berikut ini adalah jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan anak jalanan berdasarkan data dari Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar.

Table III

**Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Jalanan di Panti
Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar**

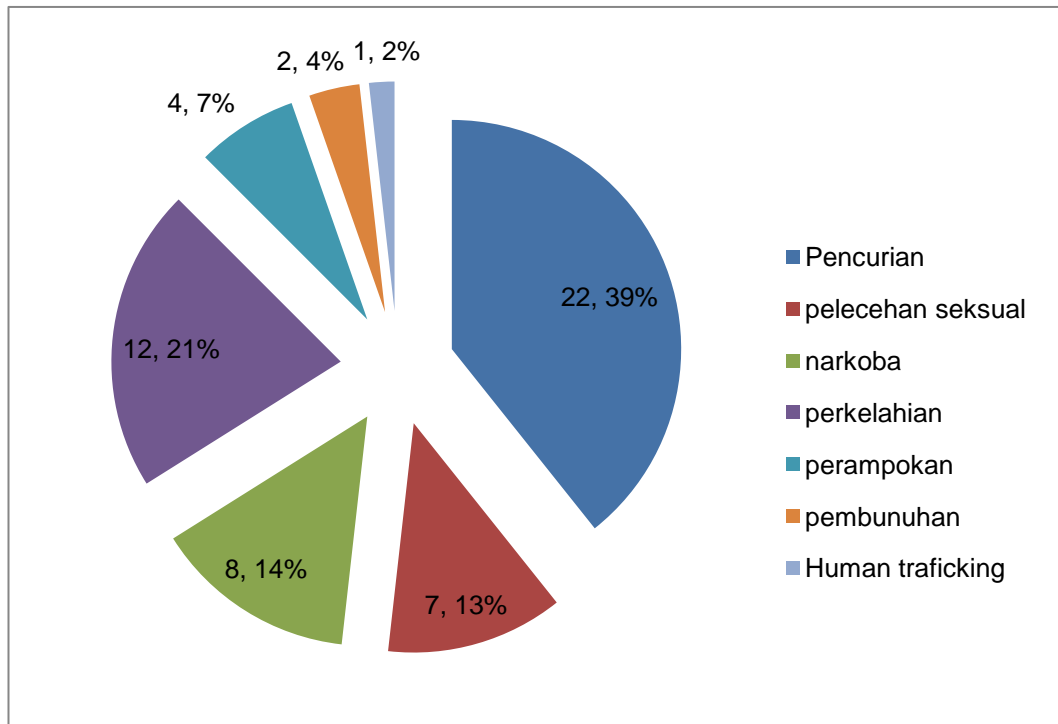
NO	KASUS	JUMLAH
1	Pencurian	22
2	Narkoba	8
3	Perkelahian	12
4	Perampokan	4
5	Pelecehan Seksual	7
6	Pembunuhan	2
7	<i>Human Traficking</i> (Perdagangan Manusia)	1
JUMLAH		56

Sumber Data: Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar berjumlah 56 orang. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut antara lain: Pencurian (sebanyak 22 orang), Narkoba (sebanyak 8 orang), Perkelahian (sebanyak 12 orang), Perampokan (sebanyak 4 orang), Pelecehan Seksual (sebanyak 7 orang), Pembunuhan (sebanyak 2 orang), dan *Human Traficking*/ Perdagangan Manusia (sebanyak 1 orang). Jumlah anak jalanan yang melakukan tindak pidana secara sederhana dapat digambarkan seperti grafik di bawah ini:

Grafik II

**Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Jalanan Di Panti
Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar**



Sumber data: Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat jumlah anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Kehidupannya di jalan membuatnya sangat rawan untuk melakukan tindak pidana (berkonflik hukum). Anak jalanan sebagai anak yang melakukan tindak pidana memiliki penyebab atau alasan sehingga mereka melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan tindak pidana .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Moch. Soleh, AKS, MM (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Marsudi Putra)⁴⁵, berdasarkan pengalamannya menangani dan merehabilitasi anak jalanan yang berkonflik hukum, faktor yang menjadi penyebab anak jalanan berkonflik hukum dapat digolongkan kedalam beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor ekonomi
2. Kurangnya perhatian orang tua
3. Perilaku meniru anak
4. Persaingan antar kelompok anak jalanan

Selengkapnya, penulis memberikan penjelasan terhadap faktor yang menjadi latar belakang anak jalanan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Suatu pengamatan terhadap masyarakat secara sosiologis memperlihatkan bahwa kekuasaan itu tidak terbagi secara merata dalam masyarakat. Struktur pembagian yang demikian itu menyebabkan bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan itu. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan pelapisan sosial. Pelapisan sosial ini bercirikan pengelompokan kekuasaan itu tadi yang lazimnya

⁴⁵ Wawancara tanggal 13 Oktober 2013

terdiri dari lapisan-lapisan atau dengan kekuasaan yang besar sedangkan lapisan-lapisan di bawah tidak atau kurang.

Bagaimana struktur-struktur yang berlapis itu bisa berbentuk banyak tergantung dari sistem perekonomian suatu masyarakat. Terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan sekelompok orang-orang tertentu berhubungan dengan sistem pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat. Kekuasaan itu tidak terlepas dari penguasaan barang-barang dalam masyarakat dan oleh karena itulah maka dikaitkan pada sistem perekonomian suatu masyarakat⁴⁶.

Sistem perekonomian suatu masyarakat yang buruk dapat menjadi Faktor penyebab timbulnya niat untuk melakukan kejahatan, khususnya bagi anak jalanan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak-anak turun ke jalan. Keadaan ekonomi yang lemah berdampak pada terbatasnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah.

Lemahnya kondisi ekonomi keluarga membuat kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi. Hal inilah yang menjadi pemicu bagi anak jalanan untuk melakukan tindak pidana, seperti pencurian. Hal ini sesuai dengan data

⁴⁶ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 149

jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan⁴⁷ yang menunjukkan bahwa 50 % anak jalanan yang menjalani pemidanaan di Lapas Kelas 1 Makassar melakukan tindak pidana pencurian.

Berada pada lingkungan keluarga yang tidak mampu dalam hal ekonomi bahkan berada di bawah garis kemiskinan, secara tidak langsung berpengaruh pada pola asuh orang tua. Orang tua mereka kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan ekonomi. Pola asuh orang tua yang tidak tepat serta tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya dapat menyebabkan anak tidak betah atau tidak dapat dikendalikan dan memilih untuk menjadi anak jalanan. Keadaan ekonomi tersebut membuat orang tua lebih fokus dalam mencari nafkah sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memberikan pengawasan dan mengasuh anaknya.

Hal ini dibenarkan oleh M. Ghufuran H. Kordi K (sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)⁴⁸ menyatakan bahwa :

Pola asuh orang tua yang buruk mempengaruhi anak untuk turun ke jalan dan melakukan tindak pidana. Orang tua menyuruh anaknya ke jalan agar mendapat penghasilan yang dapat membantu orang tuanya. Beliau menambahkan bahwa setiap orang tua dari anak jalanan mempunyai 5-7 orang anak. Dimana orang tuanya beranggapan dari pada cuman tinggal di rumah lebih baik anaknya di suruh ke jalan saja untuk mencari penghasilan.

⁴⁷ Tabel II Perbandingan Jumlah Anak Jalanan dengan Keseluruhan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Kelas 1 Makassar Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan. Hlm.

⁴⁸ Wawancara tanggal 18 Oktober 2013

Salah satu bentuk pola asuh yang salah yaitu pengabaian terhadap kepentingan anak. Pengabaian dalam mengasuh anak menurut M. Ghufuran H. Kordi K berdampak secara psikologis bagi anak itu sendiri. Anak yang diabaikan akan merasa bahwa hidupnya tidaklah berharga sehingga dia berfikir bahwa dia bebas melakukan apapun yang bisa membuatnya merasa dihargai, sebagai akibatnya anak tidak mampu menginternalisasikan norma hidup normal. Banyak dari mereka yang kebal terhadap nilai-nilai kesusilaan dan lebih rentan menerima pengaruh buruk dari lingkungannya.

Sebagai sampel untuk melihat kondisi ekonomi anak jalanan yang terlibat tindak pidana pencurian, penulis melakukan penelitian dalam bentuk wawancara kepada anak jalanan yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Dari hasil wawancara tersebut penulis diperoleh informasi bagaimana kondisi ekonomi orang tua anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian. Misalnya orang tua dari Ahmad yang bekerja sebagai buruh tani dan orang tua dari darwis yang bekerja sebagai buruh bangunan. Melihat pekerjaan dari orang tua anak jalanan pelaku tindak pidana pencurian ini, dapat disimpulkan bahwa keluarga pelaku berada pada tingkat perekonomian yang lemah, karena pekerjaan orang tua pelaku yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan, penghasilan yang diperoleh sangat kecil dan belum cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan penghasilan yang rendah, orang tua pelaku tidak dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan anaknya yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Berdasarkan keterangan Darwis (15 Tahun)⁴⁹ yang merupakan anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian mengatakan bahwa:

“saya melakukan pencurian karena dipengaruhi kondisi ekonomi karena orang tua saya kerjanya buruh bangunan yang penghasilannya sedikit sekali yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup saya, saya bekerja sebagai pengamen di jalan tetapi uang yang saya dapat sedikit jadi makanya lakukan pencurian biar bisa beli apa yang saya mau”.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ahmad (16 Tahun)⁵⁰ yang juga merupakan pelaku tindak pidana pencurian yang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Makassar yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pencurian karena orang tua saya tidak mampu kasih apa yang saya mau, saya bekerja sebagai pengamen di jalan uang yang saya dapat sedikit padahal banyak yang saya mau beli makanya saya mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan beli apa yang saya mau kayak baju, motor ”.

⁴⁹ Wawancara tanggal 3 November 2013

⁵⁰ Wawancara tanggal 3 November 2013

2. Kurangnya Perhatian Keluarga

Selain faktor ekonomi, faktor lain yang juga menjadi penyebab anak jalanan melakukan tindak pidana (berkonflik hukum) adalah kurangnya perhatian dari keluarga khususnya orang tua. Kurangnya perhatian orang tua serta pendidikan yang rendah membuat anak jalanan tidak diberikan bekal pendidikan moral kepada anak jalanan.

Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti melakukan tindak pidana (berkonflik hukum) yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul (melakukan interaksi).

Orang tua seharusnya melakukan pengawasan kepada anak, mendisiplinkan anak serta memberikan pengarahan kepada anak agar dapat menjadi anak yang baik serta mencegah anak untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Moch. Soleh, AKS, MM (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial) Panti Sosial Marsudi Putra⁵¹ menyatakan bahwa :

mayoritas anak jalanan dipanti sosial ini tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua tidak mampu dan tidak bisa mendidik anak dan hanya

⁵¹ Wawancara tanggal 13 Oktober 2013

mengharapkan uang dari anak dan menyuruh anaknya ke jalan untuk menjadi pengamen agar memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena kurang mendapat perhatian dari orang tuanya membuat anak jalanan melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan seperti mencuri dan mengkonsumsi narkoba.

Kurangnya perhatian orang tua inilah yang membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya sendiri yang mengakibatkan anak jalanan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak, seperti mencuri dan menyalahgunakan narkoba.

Hal tersebut dibenarkan oleh Syamsul Alam (15 Tahun)⁵² yang merupakan salah satu penghuni dari panti sosial tersebut karena terkait kasus penyalahgunaan narkotika yaitu sabu-sabu,

saya memakai sabu-sabu karena tidak adanya perhatian dari orang tuaku, selalu na suruh ke jalan untuk dapat uang, ndag na kasika perhatian makanya pakaika sabu-sabu untuk tenangkanki diriku.

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan orang tua dan anak, setidaknya ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dengan anak, yaitu⁵³:

⁵² Wawancara tanggal 13 Oktober 2013

⁵³ Soedjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984, Hlm. 20.

a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat ini terjadi melalui perantaraan keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki;

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orangtua dan keluarga;

c. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang tua tidak ada di rumah maupun pada saat anak di luar rumah, cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah;

d. Pemuasan kebutuhan

Pemuasan kebutuhan berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya di masyarakat luas.

3. Perilaku Meniru Anak

Keterbatasan kemampuan dalam hal ekonomi membuat pemenuhan kebutuhan anak jalanan juga terbatas. Jika dibandingkan kehidupan anak jalanan dengan kehidupan anak yang hidup secara normal, hidup di dunia dengan materialisme (kebutuhan akan materi) yang tidak terkendali berpotensi memancing anak jalanan melakukan kejahatan akibat keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhannya tidak dapat diwujudkan.

Dalam hal perilaku meniru anak, penulis dalam suatu kesempatan bertemu dan mewawancarai beberapa anak jalanan yang sedang berkumpul di salah satu tempat yang berada di sekitar daerah pampang dan sekitaran *fly over* Kota Makassar. Bukan hanya berkumpul seperti anak pada umumnya, anak tersebut terlihat sedang menghisap lem dengan menggunakan kantong. Penulis mencoba bertanya mengenai kebiasaan anak jalanan “ngelem”⁵⁴.

⁵⁴ Wawancara tanggal 12 November 2013

Awalnya cuman coba-coba karena di ajak teman, tapi sekarang saya sudah kecanduan. Sehari tidak menghisapnya badan terasa lemas sekali.

Hal tersebut dibenarkan oleh kepala bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Anak Jalanan Kota Makassar, Abdul Rahim⁵⁵

Banyak anak jalanan telah kecanduan menghisap lem, uang yang mereka gunakan dari hasil mengamen biasanya digunakan untuk membeli lem itu.

Kecenderungan anak jalanan meniru hal yang bersifat negatif tersebut disebabkan anak jalanan tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Bimbingan dan pendidikan yang merupakan wadah pembentuk watak dan karakter anak yang seharusnya sangat dibutuhkan bagi anak jalanan demi menjauhkan anak jalanan dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Karena anak jalanan tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari orang tua berpotensi memancing mereka melakukan tindak pidana seperti mencuri dan melakukan kekerasan atau bahkan mulai berani mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan yang dilarang untuk dikonsumsi.

4. Persaingan Antar Kelompok Anak Jalanan

Hidup dan tumbuh di jalanan membuat anak jalanan terbiasa berada dalam keadaan terancam akan keselamatan diri anak jalanan.

⁵⁵ Wawancara tanggal 13 November 2013

Untuk mendapatkan rasa aman anak jalanan hidup secara berkelompok. Di dalam kelompoknya itu anak jalanan merasa diterima dan mendapat pengakuan status sosial serta mendapat rasa aman dari teman kelompoknya.

Anak jalanan kemudian melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengamen secara bersama-sama dalam kelompoknya. Dalam melakukan aktivitasnya terkadang terjadi persaingan dengan kelompok anak jalanan lainnya.

Dalam wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan Sanjaya (17 Tahun), narapidana anak jalanan yang melakukan perkelahian di Pantai Losari mengatakan bahwa:

“Waktu pulang mengamen tiba-tiba ada kelompok lain yang serangka sama teman-temanku, terpaksa membalaska juga. Ternyata yang menyerang itu sedang mabuk.”

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa anak jalanan penghuni Lapas Kelas 1 Makassar⁵⁶ diperoleh data sebagai berikut:

1) Degar Alam, 16 Tahun

Melakukan pencurian pada sebuah toko perlengkapan kendaraan di Makassar. Tertangkap tangan saat sedang melakukan pencurian pada dini hari. Menurut pengakuannya dia tinggal bersama kakeknya dan setiap hari bekerja sebagai pengamen.

⁵⁶ Wawancara tanggal 3 November 2013

2) Sanjaya, 17 Tahun

Melakukan perkelahian di Pantai Losari. Menurut pengakuannya, perkelahian terjadi pada saat pulang dari mengamen dan tiba-tiba Sanjaya bersama teman-temannya diserang oleh kelompok anak jalanan lain dan akhirnya terjadilah perkelahian dengan kelompok tersebut.

3) Muhammad Budi (17 Tahun) dan Andri (18 Tahun)

Mereka berdua terlibat perkelahian dengan kelompok anak jalanan lain. Perkelahian terjadi karena saling mengejek dengan kelompok tersebut. Muhammad budi di jatuhi hukuman 4 bulan penjara sementara andri yang pada saat perkelahian sempat menikam lawannya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.

Anak yang berkonflik hukum dipengaruhi berbagai faktor yang telah penulis kemukakan di atas. Faktor- faktor tersebut merupakan penyebab anak jalanan melakukan berbagai jenis tindak pidana. Beragamnya jenis tindak pidana yang dilakukan anak jalanan menunjukkan bahwa anak jalanan tidak taat terhadap aturan hukum. Hal ini sesuai dengan teori H.C. Kelman tentang ketaatan hukum baik itu ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi, *Identification* yaitu seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, dan *Internalization* yaitu seseorang menaati suatu aturan karena benar-benar

ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Berkaitan dengan ketaatan hukum bagi anak jalanan terhadap suatu aturan hukum adalah ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu seseorang taat terhadap aturan hukum dikarenakan takut akan sanksi. Dimana derajat ketaatan ini merupakan derajat ketaatan yang sangat rendah karena dibutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Pada umumnya anak jalanan belum memahami bahwa melakukan kejahatan merupakan hal yang dilarang dan dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Anak jalanan belum memiliki ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya yang merupakan derajat ketaatan yang tertinggi. berdasarkan penelitian penulis anak jalanan yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan baik yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar maupun Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar, tidak jarang anak jalanan masih melakukan perbuatan yang sama yaitu mengulangi kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

Pada umumnya anak jalanan belum memahami dalam dirinya untuk taat terhadap hukum dengan ketaatan *internalization* sehingga anak jalanan betul-betul sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau

mengulangi kejahatan yang telah dilakukan. Berdasarkan penelitian penulis di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar di salah satu kesempatan, penulis mewawancarai seorang anak jalanan bernama Reski (15 Tahun) melakukan tindak pidana pencurian yang telah berulang kali melakukan kejahatan yang sama (residivis). Reski menyatakan bahwa:

Saya telah melakukan pencurian mulai sebelum saya masuk Sekolah Dasar (SD), 3 kali masuk panti sosial ini karena mencuri hpna tetanggaku.

Jenis tindak pidana yang dilakukan anak jalanan yang berpengaruh terhadap ketaatan dalam mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi dalam hal penegakan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di dalam masyarakat dalam melakukan interaksi⁵⁷.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 5

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum menyangkut anak jalanan yang berkonflik hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya:

A. Faktor sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya⁵⁸. Dalam rangka penegakan hukum bagi anak jalanan yang berkonflik hukum faktor peralatan yang memadai atau faktor sarana paling berpengaruh dalam melakukan penegakan hukum bagi anak jalanan.

Berdasarkan wawancara dengan Abd. Rahim (kepala bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Anak Jalanan Kota Makassar)⁵⁹ menyatakan bahwa:

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 37

⁵⁹ Wawancara tanggal 3 November 2013

Dalam menangani anak jalanan khususnya anak jalanan yang melakukan tindak pidana (berkonflik hukum) di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor penghambat dalam melancarkan kinerja khususnya dalam menangkap anak jalanan yang melakukan tindak pidana dan kemudian di rehabilitasi. Faktor utama yang menjadi kendala adalah kurangnya sarana atau fasilitas yang digunakan, seperti kendaraan yang digunakan untuk melakukan patroli di Kota Makassar dalam menangkap anak jalanan karena tanpa sarana yang memadai mustahil kami dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual atau peranannya secara nyata di masyarakat. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut⁶⁰:

- a. Fasilitas yang tidak ada kemudian diadakan yang baru
- b. Fasilitas yang rusak kemudian diperbaiki atau dibetulkan
- c. Fasilitas yang kurang kemudian ditambah
- d. Fasilitas yang macet kemudian dilancarkan
- e. Fasilitas yang mundur atau merosot kemudian dimajukan atau ditingkatkan

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 44

B. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu yang berbeda-beda satu sama lain mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum yang variasinya adalah⁶¹:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum yakni hukum positif tertulis
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 45

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik atau buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Berkaitan dengan budaya hukum masyarakat (kultur hukum) menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum senantiasa digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Dilihat dari segi ketaatan masyarakat khususnya anak jalanan berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Laura Beth Nielsen mendefinisikan kesadaran hukum sebagai bagaimana orang berfikir tentang hukum, tentang norma-norma umum dari hukum, tentang praktik setiap hari, dan tentang cara yang umum digunakan dalam berhubungan

dengan hukum atau permasalahan hukum, kajian itu berfokus pada kajian tentang pengalaman- pengalaman individu dengan hukum dan norma-norma hukum, keputusan tentang ketaatan hukum, dan satu eksplorasi rinci tentang cara dimana hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari⁶².

Kesadaran hukum adalah kajian yang tidak hanya sekadar tentang bagaimana orang berfikir tentang hukum (kesadaran), tetapi juga mencakup kajian tentang bagaimana ide-ide yang sebagian besar merupakan ide yang tidak sadar hukum, justru mempengaruhi keputusan (perilaku dan sikap). Kesadaran hukum merepresentasikan pentingnya pengembangan dan peningkatan teoretis dan metode kajian tentang sikap hukum.

Berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat, khususnya anak jalanan terhadap suatu aturan hukum adalah bersifat *compliance* yaitu taat terhadap aturan hukum dikarenakan takut akan sanksi sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya.

Untuk mengetahui mengapa seseorang menaati hukum, setidaknya ada 3 pandangan yang dapat dijadikan patokan, yaitu mengapa seseorang menaati hukum yaitu⁶³:

1. Pandangan ekstrem pertama adalah pandangan bahwa merupakan kewajiban moral bagi setiap warga Negara untuk melakukan yang

⁶² Achmad Ali. 2009. *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta:Kencana. Hlm. 338

⁶³ *Ibid*, Hlm. 372

terbaik yaitu untuk senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsisten, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lazim.

2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang (*prima facie*) adalah kewajiban untuk menaati hukum.
3. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

Sedangkan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam hal ketaatan hukum secara umum, faktor tersebut antara lain⁶⁴:

1. Relevansi antara aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 376

substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan tentunya akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.

7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahap (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung” adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan

mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.

9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya penanggulangan bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tindakan preventif, tindakan penghukuman maupun tindakan kuratif.

Menurut Kartini kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif⁶⁵

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal ini tindakan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak, berupa:

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
- c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- e. Membentuk kesejahteraan anak-anak;
- f. Mengadakan panti asuhan;
- g. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, penforeksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- h. Membuat badan supervice dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen disertai program yang korektif;
- i. Mangadakan pengadilan anak;
- j. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;

⁶⁵ M. Nasir Djamil, Mengutip Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 94-97

- k. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- l. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- m. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinquen.

2. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja pelaku tindak pidana, antara lain berupa : menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- d. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin;
- e. Memanfaatkan waktu senggang di camp pelatihan, untuk membiasakan diri mereka bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;

- f. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja pelaku tindak pidana bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- g. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan *United Nation For Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak (pelaku tindak pidana) atau *The Riyadh Guidelines*, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan terhadap anak dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga: keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan kebijakan sosial lainnya.

a. Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak;

- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman;
- 3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat;
- 4) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya;
- 5) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa yang akan datang.

b. Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- 1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak;
- 2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya;
- 3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan;
- 4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat;
- 5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan lainnya;

- 6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras;
- 7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak;
- 8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial;
- 9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat;
- 10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan;
- 11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswa agar mewakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

c. Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja;

- 2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal;
- 3) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa;
- 4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal;
- 5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para remaja.

d. Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- 1) Media massa didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber;
- 2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat;
- 3) Media massa agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar;
- 4) Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obat terlarang.

C. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Anak

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya⁶⁶. Begitupun dalam rangka penegakan hukum, ada faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan penegakan hukum itu efektif atau tidak, khususnya penegakan hukum dalam rangka menjamin hak-hak anak jalanan yang berkonflik hukum.

Lembaga yang berperan dalam penegakan hukum untuk menjamin hak-hak anak jalanan yang berkonflik hukum adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1998. Pendirian LPA Sulawesi Selatan didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Departemen Sosial Republik Indonesia dan *UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)* Pada tahun yang sama berdiri pula di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima Lembaga Perlindungan Anak tersebut merupakan generasi pertama Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia.

⁶⁶ Achmad Ali. *Lot.cit. Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Hlm. 375

Saat ini, Lembaga Perlindungan Anak telah berdiri di seluruh Provinsi di Indonesia, dan ratusan Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan M. Ghufrani H. Kordi K menyatakan bahwa

lembaga ini merupakan lembaga independen. Keanggotaan dalam lembaga ini merupakan gabungan dari berbagai profesi, seperti dosen, advokat (pengacara), mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai minat dan perhatian kepada anak, khususnya anak jalanan.

Lembaga ini mendapat dukungan dari pemerintah, dukungan tersebut berupa bantuan dana pada setiap program yang diadakan oleh lembaga ini guna melindungi atau memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak jalanan yang berkonflik hukum (melakukan tindak pidana).

Walaupun mendapat bantuan dari pemerintah dan UNICEF akan tetapi lembaga ini belum berjalan secara maksimal dalam memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang ada di Kota Makassar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan lembaga ini sehingga belum dapat menyentuh serta memberi bantuan kepada semua anak jalanan di Kota Makassar yang memerlukan bantuan saat anak jalanan berkonflik hukum.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penegakan hukum yang diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan lembaga perlindungan anak Sulawesi selatan, terdapat faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dalam melaksanakan tugasnya menjamin hak-hak anak jalanan yang berkonflik hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum bagi anak jalanan yang berkonflik hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan dapat berlangsung secara efektif. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakupi:

1. Kurangnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil

Tanpa adanya tenaga manusia yang menggerakkan dan melaksanakan program kerja dari setiap organisasi maka mustahil organisasi itu akan dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga berlaku bagi Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, dimana dalam lembaga ini dibutuhkan tenaga manusia yang berpendidikan, terampil serta mempunyai dedikasi terhadap kelangsungan hidup anak jalanan yang berkonflik hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Ghufuran H.Kordi K yang menyatakan bahwa:

Lembaga ini mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas membantu anak jalanan yang berkonflik hukum, diantaranya kurangnya tenaga kerja yang membantu di lapangan. Hal ini karena jumlah pengurus di lembaga ini hanya 12 orang dimana mayoritas anggota yang bekerja di

lembaga perlindungan anak ini mempunyai jadwal kegiatan yang padat sehingga susah mengatur waktu dalam melakukan upaya perlindungan anak sementara wilayah kerja Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan sangat luas. Tenaga kerja tersebut seperti dosen, pengacara, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kurangnya tenaga kerja yang membantu di lapangan membuat lembaga perlindungan anak Sulawesi selatan sulit untuk menjangkau seluruh anak jalanan yang berkonflik hukum yang semestinya mendapatkan bantuan dalam rangka tetap menjamin terpenuhinya hak-haknya.

2. Peralatan yang memadai

Peralatan yang memadai dalam hal ini yaitu kurangnya atau bahkan tidak adanya jaringan ke lembaga swadaya lain atau lembaga perlindungan anak yang berada di daerah lain dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang berkonflik hukum. Hal ini berdampak pada lambatnya perlindungan yang diberikan bagi anak jalanan yang sedang dalam proses hukum terkait tindak pidana yang dilakukan, M. Ghufra H.Kordi K menyatakan bahwa:

Jaringan ke Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Perlindungan Anak di daerah hampir tidak ada, jadi ketika terjadi kasus di daerah tersebut maka tidak ada jaringan untuk kerjasama yang mengakibatkan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan harus turun secara langsung ke daerah tersebut. Meskipun ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan tetapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini hanya berada pada tingkat nasional atau hanya berada dipusat sehingga susah menjangkau ke daerah-daerah pelosok.

3. Faktor keuangan yang terbatas

Anggaran (keuangan) merupakan salah satu faktor utama efektifnya program kerja yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak Sulawesi selatan. Terbatasnya anggaran yang diperoleh lembaga ini membuat program kerjanya terbatas dalam hal memberikan perlindungan bagi anak jalanan yang berkonflik hukum. M. Ghufuran H.Kordi K menyatakan bahwa:

Sejak berdirinya lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan kami mendapat bantuan dari pemerintah dalam hal ini yaitu Kementrian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) akan tetapi bantuan yang diberikan kepada lembaga ini tidak secara langsung melainkan melalui program yang disetujui untuk dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak jalanan yang berkonflik hukum. oleh karena itu Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan ini sejak awal didirikan bertujuan untuk amal sosial, jadi orang kerja di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk beramal bukan untuk mendapatkan pekerjaan

Walaupun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak jalanan yang berkonflik hukum di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, akan tetapi lembaga ini akan terus memberikan kontribusi positif bagi anak jalanan. Untuk itu lembaga ini berusaha mengatasi kendala tersebut. M. Ghufuran H. Kordi K menyatakan bahwa

Walaupun terdapat banyak kendala Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas akan tetapi kami dapat mengatasi hambatan tersebut dengan mendorong penguatan di pemerintah untuk mendorong perubahan kebijakan, karena jika ditinjau dari konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) memang tugas pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya perlindungan bagi anak jalanan. terkait Banyak aparat yang tidak profesional maka kami mendorong agar lebih baik dengan melakukan perubahan serta pengawasan. Dan jika pemerintah sudah bagus dalam memenuhi hak-hak anak maka dengan sendirinya Lembaga Perlindungan Anak ini akan bubar atau mungkin hanya menjadi lembaga pemantau saja dan selama pemerintah masih belum mampu maka Lembaga Perlindungan Anak ini akan senantiasa hadir dalam mewujudkan hak-hak dalam rangka perlindungan anak. Karena tidak ada lembaga lain yang mengontrol, memperkuat dan mendorong pemerintah memenuhi hak-hak anak serta melakukan pengawasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu Lembaga Perlindungan Anak yang peduli dan mempunyai dedikasi terhadap anak jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Lembaga ini berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan, Melakukan pengawasan pada beberapa proses hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan agar dipastikan anak dapat menikmati hak-haknya.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum di Kota Makassar yaitu Faktor ekonomi, Kurangnya perhatian orang tua, Perilaku meniru anak, dan Persaingan antar kelompok anak jalanan. Dimana faktor ekonomi yang menjadi faktor dominan anak turun ke jalan dan melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana (berkonflik hukum).
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dipengaruhi faktor-faktor Yang Berpengaruh

Terhadap Efektivitas Peran Lembaga ini yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum bagi anak jalanan yang berkonflik hukum, diantaranya: kurangnya Peralatan yang memadai, dan Faktor keuangan yang terbatas.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah Penulis simpulkan sebelumnya. Sampailah ke akhir penulisan dalam skripsi berupa saran yang sekiranya penulis dapat member sumbangsih demi meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan:

1. Hendaknya Lembaga Perlindungan Anak di Kota Makassar terkhusus Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dapat memaksimalkan perannya dengan memberikan perlindungan bagi semua anak jalanan di Kota Makassar yang memerlukan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang dapat menjadi penunjang bagi anak jalanan menikmati hak-haknya sebagai anak.
2. Hendaknya pengawasan yang dilakukan Lembaga perlindungan Anak Sulawesi Selatan lebih diperketat terhadap aparat penegak hukum terkait dengan kekerasan yang dilakukan Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penangkapan terhadap anak jalanan karena selain melanggar hak asasi manusia juga telah mencederai hak-hak dari anak jalanan.

3. Hendaknya Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan lebih melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan perlindungan anak yang berada di daerah guna membentuk jaringan kerjasama sehingga Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dapat menjangkau semua anak jalanan baik yang ada di desa maupun yang ada di kota.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Achmad Ali. 2009. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) 2000. *Modul Pelatihan Dan Pimpinan Rumah Singah*. Jakarta : Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi. 2002. *Krisis dan Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University Press

Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Sosial RI. 2001. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial. Hlm. 20

Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kartini Kartono. 1992. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. KORAN

Kompas, 6 September 2013, *Hingga Agustus 7.526 Anak Berkasus Hukum*. Hlm. 28

4. MAKALAH

Irwanto. *"Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar"*. Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997

5. WEBSITE

<http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html>. diakses pada tanggal 9 September 2013 Pukul 11.07 WITA

http://komnaspaspa.or.id/Komnaspaspa/Tentang_Kami.html. diakses pada tanggal 5 September 2013 Pukul 17.44 WITA

<http://makassar.antaranews.com/berita/20282/jumlah-anak-jalanan-di-makassar-meningkat.html>. diakses pada tanggal 4 september 2013 pukul 09.53

http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan. diakses 04 september 2013, Pukul 15.00 WITA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses pada tanggal 5 september pukul 11.26 WITA

<http://cintarakyatindonesia.wordpress.com/2011/04/18/aspek-hukum-perindungan-dan-hak-hak-anak-jalanan/>, diakses pada 04 September 2013, Pukul 15.38 WITA.

<http://merdeka.com/profil/indonesia/k/komisi-nasional-perindungan-anak/> diakses pada tanggal 5 September 2013 Pukul 18.11 WITA.

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=307326>. Html, diakses pada tanggal 5 september 2013 pukul 13.47 WITA